KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.OT.02.02-144
Tanggal Pembuatan	21 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	21 Maret 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
Nama SOP	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan melalui Aplikasi Simpelkum Pabar

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani 5. Memahami dan menguasai pengoperasian aplikasi Simpelkum Pabar
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Jaringan internet; 3. Alat komunikasi; 6. Aplikasi Simpelkum Pabar
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
SOP ini berlaku untuk Layanan Penerbitan Surat Keterangan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan melalui Aplikasi Simpelkum Pabar dan seterusnya. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan melalui Aplikasi Simpelkum Pabar diperlukan untuk memberikan layanan publik secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka layanan publik bagi masyarakat akan terhambat.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Administrator	Kepala Kantor Wilayah				
1.	• Mengakses aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Hukum Kanwil Papua Barat melalui link website: www.simpelkum.pabar • Membuat akun pengguna layanan • Melengkapi berkas sesuai persyaratan layanan dan contoh pada aplikasi	MULAI			Data Identitas Pemohon	15 menit	Dokumen persyaratan permohonan layanan	
2.	Tim pemeriksa dokumen persyaratan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dan penyusunan drat surat keterangan	T		Y	Dokumen persyaratan permohonan layanan	10 menit	Verifikasi dokumen persyaratan permohonan layanan dan konsep surat rekomendasi	Y : Ya T : Tidak
3.	Menandatangani dokumen permohonan				Konsep surat rekomendasi	3 jam	Surat rekomendasi yang telah ditandatangani	
4.	Melakukan upload dokumen yang telah ditandatangani Kakanwil pada aplikasi				Surat rekomendasi yang telah ditandatangani	5 menit	Surat rekomendasi dalam bentuk softcopy	
5.	Pemohon menerima dokumen dengan cara mendownload surat keterangan pada akun pribadi dalam aplikasi	SELESAI			Surat rekomendasi dalam bentuk softcopy	5 menit	Surat rekomendasi disimpan / dicetak secara mandiri oleh pemohon	**Layanan Gratis**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi